



HAM  
Belum Jadi Etika  
Politik

Refleksi akhir tahun KontraS sampai pada kesimpulan bahwa situasi HAM tahun 2006 telah memasuki tahap *genting*. HAM diserang dari segala penjuru. Bukan hanya nilai, norma dan aturannya, tapi juga institusi-institusi penopang tegaknya HAM. HAM sebagai etika politik dipinggirkan oleh cara pandang dan kepentingan sempit elite penguasa. Institusi tertinggi di bidang yudikatif gagal menghadirkan keadilan bagi korban. Institusi legislatif hanya janji-janji kepada korban. Politik Istana adalah politik keraguan, bukan politik HAM sejati.

Proses damai Aceh cenderung menolak keadilan bagi korban konflik Aceh. Penegakan hukum dan HAM Papua tak berubah, dan institusi-institusi HAM sebagai amanat UU Otsus belum dibentuk. Poso belum bebas dari aksi teror. Kekerasan negara masih tumbuh subur di Sumatera Utara.

Tahun ini adalah tahun impunitas, tahun *gagalnya* Negara menuntut dan mengadili mantan Presiden Soeharto lewat SKP3 kasus korupsi yayasan. Ini menihilkan seluruh nilai moral dan politik reformasi. Negara membuat kejahatan-kejahatan masa lalu tak memiliki arti, hilang dan tak terdefinisikan. Impunitas ada di mana-mana. Di Mabes Polri, penyidikan kasus Munir tidak berani menyentuh keterlibatan pejabat BIN. Di Komnas HAM, penyelidikan kasus Talangsari 1989 lagi-lagi tak diselesaikan. Di Kejaksaan Agung, berkas penyelidikan kasus pelanggaran HAM berat masih menumpuk. Kekerasan-kekerasan militer berlalu tanpa penghukuman.

ISBN 978-979-16801-0-3



9789791680103

**KontraS**

Komisi untuk orang Hilang  
dan Korban tindak kekerasan  
JL. Borobudur No.14 Menteng  
Jakarta 10320 - Indonesia